



# Forum Komunikasi Program MFP II

Dr. Agus Justianto, Co-Director MFP II (duduk paling kiri) tampak beserta delegasi Indonesia lainnya yang dipimpin Dr. Yetti Rusli, Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan (duduk paling kanan)



## Berburu Pasar Karbon ke Benua Kanguru

**Delegasi Indonesia di pimpin Dr. Yetti bertolak ke Australia untuk peninjauan kerjasama Carbon Market, menindaklanjuti pertemuan UNFCCC, Bali 2007**

Merespon undangan Pemerintah Australia (AusAID) kepada Departemen Kehutanan, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Yetti Rusli (Kepala Badan Planologi Kehutanan) berangkat untuk pertemuan bilateral tentang International Carbon Market di Australia 11-14 Agustus.

Anggota delegasi terdiri dari Ir. Umiyati Hayatun, MSc. (Deputi Kepala Bappenas Bidang SDA dan LH), Ir. Basah Hernowo, MA. (Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, BAPPENAS), Dr.

Hanafi Guciano (Ahli Exchange Market PGR), Dr. Taufiq Alimi (Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabeling Indonesia), Dr. Agus Justianto (Co-Director, Indonesia-UK Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme), dan Ratu Silvy Gayatri (Kedutaan Besar Indonesia di Canberra).

Pertemuan dimaksud merupakan tindak lanjut dari Subsidiary Agreement between the Government of Australia and the Government of Indonesia relating to a Program of Bilateral Cooperation to Reduce Greenhouse Gas Emissions Associated with Deforestation in Indonesia under the Global Initiative on Forests and Climate (GIFC) yang ditandatangani pada 3 Oktober 2007. GIFC

kemudian disepakati diubah menjadi International Forests Carbon Initiative (IFCI).

Tujuan pertemuan adalah untuk membahas kemungkinan upaya-upaya yang dapat disepakati bersama untuk mendorong prospek pasar carbon baik compliance market maupun voluntary market termasuk perdagangan dalam bursa komoditi



Disarikan dari laporan perjalanan Dr. Agus Justianto. Dukungan program MFP II terkait rencana kerja strategis dalam peninjauan pasar karbon sebagai insentive pengelolaan hutan lestari adalah dengan mendukung keikutsertaan wakil Civil Society dari Lembaga Ekolabel Indonesia dalam delegasi Indonesia ke Australia.

## Beberapa hasil dan tindak lanjut :

1. Menindaklanjuti hasil UNFCCC di Bali, Indonesia & Australia sepakat bekerjasama merintis pengembangan pasar karbon internasional untuk hutan melalui compliance market (termasuk REDD) maupun voluntary market

2. Indonesia perlu sesuaikan kriteria dan standar perdagangan karbon internasional (termasuk register system) yang punya pemikiran sama seperti AFD (Perancis), DFID (UK), dan Clinton Foundation

3. Mendorong terbentuknya pasar karbon regional yang melibatkan Indonesia, Australia, dan Jepang

4. Beberapa langkah kerjasama yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Scale-up kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendapatkan data potensi, modal, tantangan dan hal-hal penting untuk pengembangan sistem perdagangan karbon internasional
- b. Pengembangan kapasitas nasional untuk pengembangan standar pasar karbon, mekanisme verifikasi karbon, register dan sistem kelembagaannya, mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan, dan pemasaran karbon (hutan) Indonesia

5. Selama ini hutan hanya dipandang sebagai pengemisi karbon padahal juga menyerap karbon. Untuk itu, kampanye di tahap awal perlu dilakukan untuk mengubah pandangan tersebut

6. Perlunya kerjasama dan koordinasi yang erat antara instansi pemerintah terkait, yang juga melibatkan para pemangku kepentingan lainnya untuk dapat memanfaatkan peluang dan sumberdaya yang ada untuk kepentingan nasional yang lebih luas



Potensi karbon dari hutan alam Indonesia

### BUTIR - BUTIR POKOK HASIL PERTEMUAN

1. Pertemuan dengan Australia Securities Exchange (ASX). ASX sudah memulai emission trading sejak beberapa tahun lalu terutama emisi gas dan electricity. Permintaan pasar Australia terhadap kredit emisi sangat besar. Peluang kerjasama untuk green carbon dapat dilakukan melalui clearing house di Austraclear, jika Indonesia ingin menjual karbon ke perusahaan Australia.
2. Pertemuan dengan Carbon Conservation (CC) dan Linden Group CC adalah pemain pasar utama produk kehutanan Australia (terutama avoided deforestation). CC mendorong small scale green carbon market Indonesia berbasis masyarakat dalam rangka Millenium Development Goals (MDGs) dan mengajak pihak-pihak di Indonesia mengembangkan standar eligibility, perhitungan carbon untuk dipasarkan secara internasional.
3. Pertemuan dengan the Australian Climate Exchange (ACX) ACX melihat kemungkinan perdagangan karbon dari offset hutan dan kemungkinan merintis produk green carbon masuk di bursa Australia dalam konteks business to business. ACX menyarankan bekerjasama dengan lembaga register bereputasi internasional, seperti Blue Registry (dikelola TUV) dimana TUV bekerjasama dengan Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) dalam sertifikasi pengelolaan hutan.
4. Pertemuan dengan Clinton Climate Initiative (CCI) diperoleh informasi tentang: (i) pentingnya kejelasan dan kepastian kebijakan (seperti dilakukan China) untuk ditetapkan sebagai standard karbon yang dapat diperdagangkan sesuai kepentingan nasional dan nilai-nilai umum yang dianut standard lain secara internasional; (ii) penting mengembangkan infrastruktur perdagangan karbon
5. Pertemuan dengan Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). CSIRO banyak lakukan penelitian karbon dan kehutanan termasuk di Indonesia. CSIRO bersedia bekerjasama mengembangkan metodologi carbon accounting dan investasi untuk pasar karbon hutan, termasuk pasar voluntary.

Pelepasan emisi karbon karena kebakaran hutan di Indonesia



6. Pertemuan dengan Profesor Ross Garnaut (Penasehat Perdana Menteri Australia untuk Perubahan Iklim), saat tengah menyusun Climate Change Review, menilai Indonesia mempunyai potensi besar mengembangkan unit-unit pengelolaan hutan masyarakat untuk dilibatkan dalam perdagangan karbon internasional sejalan dengan program pengentasan kemiskinan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Prof. Ross Garnaut mengusulkan untuk menggalang kerjasama regional antara Australia, Indonesia, Papua Nugini, Jepang dan Korea untuk perdagangan karbon hutan.
7. Pertemuan dengan Department of Climate Change (DCC) dan AusAID menekankan pentingnya Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership yang ditandatangani dalam kunjungan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd ke Indonesia pada bulan Juni 2008. Pelaksanaan kerjasama tersebut antara lain adalah pengembangan National Carbon Accounting System (NCAS) dan Forest Resource Information System (FRIS), penyusunan Roadmap for Access to International Carbon Markets.
8. Delegasi Australia melihat pentingnya menindaklanjuti segera Roadmap for Access to International Carbon Markets yang disepakati antara Presiden RI dan Perdana Menteri Australia. Delegasi Indonesia menyampaikan konsep Roadmap sebagai masukan pembahasan lebih lanjut pada Joint Steering Committee Meeting dari Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership yang akan datang. Roadmap berupa tahapan-tahapan pendekatan mencakup explorasi dan stock taking, penetapan kebijakan dan pengembangan kapasitas, pembangunan kapasitas sertifikasi karbon, dan penyusunan peraturan bilateral dan nasional yang mendukung terlaksananya pasar karbon.
9. Delegasi Australia menyampaikan pentingnya pendekatan pasar karbon global dengan fokus tercapainya compliance market di bawah UNFCCC sebagai bagian hasil pasca 2012 selain peran pasar karbon secara voluntary, khususnya yang melibatkan sektor swasta dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Delegasi Indonesia menyampaikan penting mendorong pasar karbon voluntary yang melibatkan unit-unit pengelolaan hutan masyarakat yang telah ada dalam skala kecil sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan khususnya masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan.
10. Dalam pengembangan National Carbon Accounting System (NCAS) dilaporkan bahwa in-posting staf Badan Planologi Kehutanan pada Department of Climate Change di Canberra saat ini telah berjalan dengan baik dan semua pakar yang terlibat dalam kegiatan tersebut memperoleh pengetahuan sangat berharga, termasuk pemanfaatan data Landsat dan Pulsar oleh Indonesia. Australia melanjutkan kerjasama NCAS ini dengan melibatkan Clinton Foundation dan Global Earth Observation System, sehingga semua pihak dapat memperoleh hasil yang lebih cepat dan manfaat yang lebih besar



Kiri: Suasana perundingan delegasi Indonesia di pimpin Dr. Yetti Rusli

Kanan: Para delegasi merayakan sukses muhibah dalam jamuan dinner

